

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN SUNGGAL PADA PEMILU 2024 (STUDI MENINGKATNYA GOLPUT DI KECAMATAN SUNGGAL)

Muhamad Faizal

NPP 32.0086

Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: faisal-mohamadi585@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus Toana, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The issue that prompted the researcher to choose this topic is the role of the KPUD Deli Serdang, the Sunggal Subdistrict Government, and the Sunggal Subdistrict PPPK in increasing the political participation of the Sunggal community in the 2024 General Election. **Purpose** To identify and describe the forms of political participation of the Sunggal Subdistrict community in the 2024 General Election and to propose efforts to enhance such participation. **Method:** This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques involve primary data obtained through interviews, and secondary data obtained through documentation. The researcher used purposive sampling in selecting the informants. **Results/Findings** The results show that political participation of the people in Sunggal Subdistrict in the 2024 election remains low. Inhibiting factors include low public trust in the government, suboptimal political socialization, low willingness of the people to change their mindset, insufficient budget, and high political apathy. On the other hand, supporting factors include socialization programs initiated by KPUD, collaboration with community and religious leaders, and direct involvement of the local government in building political communication with the people. **Conclusion:** Political participation in Sunggal Subdistrict during the 2024 election remains low, mainly due to a lack of trust in the government, weak reciprocity norms, and underdeveloped social networks. The Golput (non-voter) phenomenon in this region is not due to political ignorance, but rather a form of disappointment and protest against a political system perceived as lacking transparency and responsiveness to public aspirations. Inadequate political outreach, especially among remote or less-educated communities, along with the prevalence of corruption, collusion, and nepotism (KKN), further aggravates the situation. Nevertheless, there are supporting factors such as collaboration with community leaders and KPUD socialization efforts. To address these barriers, the government and KPUD Deli Serdang have undertaken various initiatives, including improving public services, providing political education, increasing policy transparency, and establishing communication forums to restore public trust and encourage active civic engagement in the democratic process.

Keywords: Public Political Participation, 2024 General Election, Sunggal Subdistrict

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Permasalahan yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil judul ini ialah bagaimana tingginya angka Golput di Kecamatan Sunggal dalam partisipasi politik pada Pemilu 2024. **Tujuan :** Untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024. **Metode:** menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan Purposive sampling dalam menentukan informan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024 masih rendah, Faktor penghambat dalam penelitian ini meliputi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sosialisasi yang belum optimal, rendahnya keinginan masyarakat untuk mengubah pola pikir, anggaran yang belum memadai, dan tingginya apatisme masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya program sosialisasi dari KPUD, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama, serta keterlibatan langsung pemerintah dalam membangun komunikasi politik dengan masyarakat. **Kesimpulan:** Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal dalam Pemilu 2024 masih rendah, yang utamanya dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya norma timbal balik, dan kurangnya jaringan sosial yang kuat, Fenomena Golput di wilayah ini bukan semata karena ketidaktahuan, melainkan bentuk kekecewaan dan protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak transparan dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Sosialisasi politik yang belum optimal, terutama di kalangan masyarakat terpencil dan berpendidikan rendah, serta maraknya praktik KKN, turut memperparah kondisi ini. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan program sosialisasi dari KPUD. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah dan KPUD Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya, termasuk peningkatan pelayanan publik, edukasi politik, transparansi kebijakan, serta pembentukan forum komunikasi demi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilu 2024, Kecamatan Sunggal

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di berbagai negara. Miura, Lee, dan Kim (2025) dalam studi mereka di Korea Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam asosiasi pemerintahan lokal mampu meningkatkan efikasi politik dan memperkuat hubungan antara warga dan institusi. Warga yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan di tingkat lokal cenderung merasa lebih percaya diri, memiliki pemahaman lebih baik tentang proses politik, serta menunjukkan loyalitas yang lebih kuat terhadap sistem demokrasi.

Sementara itu, Liu (2024) dalam konteks Asia menemukan bahwa partisipasi dalam organisasi nirlaba secara signifikan dapat mendorong keterlibatan politik, khususnya di negara-negara dengan stabilitas demokrasi tinggi. Hal ini diperkuat oleh Nyqvist et al. (2024) yang menyatakan bahwa modal sosial, seperti keterlibatan dalam asosiasi dan kepercayaan sosial, berkontribusi positif terhadap partisipasi politik, baik secara konvensional maupun non-konvensional. Ketiga studi ini menegaskan bahwa struktur sosial yang kuat dan inklusif menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

Partisipasi politik merupakan komponen vital dalam sistem demokrasi, karena menunjukkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Miriam Budiardjo (2008:155) menyebut partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Verba, Schlozman, dan Brady (1995:269) menambahkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh sumber daya, keterlibatan, dan ajakan langsung kepada masyarakat. Namun, realitas di Kecamatan Sunggal menunjukkan bahwa partisipasi dalam Pemilu 2024 masih tergolong rendah, tercermin dari tingginya angka golongan putih (golput). Robert Putnam dalam Santoso (2020:188) menegaskan bahwa partisipasi politik sangat bergantung pada modal sosial, yaitu kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial yang aktif. Fenomena golput yang meningkat bukan sekadar tanda apatisisme, tetapi juga bentuk partisipasi non-konvensional yang sarat makna. Barnes dan Kaase (1979) menjelaskan bahwa tindakan seperti tidak memilih dapat dipandang sebagai ekspresi protes terhadap sistem politik yang tidak responsif. Milbrath dan Goel (1977) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam tiga kelompok: *gladiators*, *transitionals*, dan *spectators*; dan masyarakat Sunggal banyak yang tergolong sebagai *spectators*, yakni hanya mengamati tanpa terlibat. Menurut Acu (2009:16), golput adalah fenomena saat pemilih yang memiliki hak suara memilih untuk tidak memilih karena kekecewaan terhadap sistem politik. Kekecewaan ini diperparah oleh janji politik yang tidak direalisasikan dan pelayanan publik yang belum optimal.

Ilmuwan Indonesia juga menyoroti pentingnya responsif pemerintah dalam mendorong partisipasi politik. Labolo (2022) menekankan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Mereka mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi, seperti pemilihan umum, diskusi publik, organisasi politik, dan konsultasi publik, sebagai sarana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Ramlan Surbakti (1992) menekankan bahwa partisipasi politik adalah sarana kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Arif, M., & Mulyana, M. (2020) Partisipasi masyarakat masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada hingga saat ini dan belum banyak terungkap secara jelas, sehingga dapat diibaratkan seperti ruang gelap yang menyimpan banyak pertanyaan. Sudarsono (2002) menambahkan bahwa fungsi pemerintah yang baik adalah mampu merespons kebutuhan warganya. Averus, A. & Alfina, D. (2020) menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran politik, keyakinan terhadap pemimpin dan sistem, serta faktor pendidikan, ekonomi, dan kemauan politik. Santoso (2020) melalui teori modal sosial menjelaskan bahwa partisipasi warga akan kuat jika terdapat solidaritas, toleransi, dan kepercayaan sosial. Firman Noor (2020) bahkan menyebut krisis kepercayaan sebagai salah satu ancaman terbesar dalam demokrasi lokal, sebagaimana yang juga terlihat di Kecamatan Sunggal. Maka, reformasi kebijakan, transparansi, dan pelibatan publik adalah solusi utama untuk memperbaiki kondisi ini. Untuk memperkuat argumentasi di atas, berikut disajikan tabel partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal dalam Pemilu 2024 berdasarkan data KPUD Deli Serdang:

Tabel 1.1

Partisipasi PEMILU Presiden 2019 dan 2024 Kabupaten Deli Serdang

No	Kecamatan	Jumlah DPT		Menggunakan Hak Pilih		% Golput	
		2019	2024	2019	2024	2019	2024
1	Percut Sei Tuan	284.852	291.810	193.450	207.912	32.09	28.75
2	Sunggal	197.922	179.438	122.651	127.832	38.03	28.76
3	Hamparan Perak	106.222	122.419	84.436	93.853	20.51	23.33
4	Tanjung Morawa	139.756	166.012	114.056	127.410	18.39	23.25
5	Patumbak	69.880	71.686	48.606	50.330	31.22	25.79

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Sunggal mencatat angka golput yang cukup tinggi, yakni 28,76%. Angka ini mencerminkan permasalahan serius dalam kualitas demokrasi lokal dan menunjukkan pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses politik. Dengan mengacu pada teori Putnam dan berbagai pendapat ahli, partisipasi tidak hanya sekadar datang ke TPS, tetapi juga terkait erat dengan kepercayaan terhadap sistem dan keberfungsian pemerintah sebagai representasi rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal dan bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasinya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Partisipasi politik masyarakat merupakan prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, termasuk di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat Golput tinggi. Berdasarkan data KPUD Deli Serdang tahun 2024, Kecamatan Sunggal menduduki peringkat kedua tertinggi dalam total suara Golput pada pemilu 2024. Hal ini dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan pemerintah. Berdasarkan data fenomena yang peneliti temukan di lapangan. Dalam proses Pemilu tahun 2024 KPUD Deli Serdang mencatat bahwa adanya pelanggaran oleh pejabat pemerintah dimana masih banyak budaya patronase dan politik uang pada Kabupaten Deli Serdang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal masih berpotensi dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, penting untuk meneliti

bagaimana peran strategis KPUD Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, dan PPPK Kecamatan Sunggal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan merujuk pada penelitian yang telah ada peneliti dapat memperoleh referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu juga diperlukan untuk membandingkan hasilnya dengan penelitian yang akan datang sehingga dapat menjadi sumber referensi yang sesuai. Peneliti perlu menjelaskan beberapa aspek dari penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai penelitian berikut

Khairunnisa et al., (2024) dengan judul “Analisis Penyebab Mahasiswa Tidak Memilih Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauro Jambi”. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu, khususnya fenomena golput di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada identifikasi penyebab internal maupun eksternal yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak menggunakan hak pilihnya, seperti tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, ketidakpuasan terhadap calon atau partai politik, minimnya pemahaman tentang pentingnya pemilu, serta pengaruh lingkungan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi partisipasi politik mahasiswa dan menawarkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mereka dalam proses partisipasi politik dan proses keterlibatan demokrasi.

Taun Taun et al., (2023) dengan judul “Analisis Penyebab Fenomena Golput Dalam Pemilu dari Masa ke Masa”. Penelitian ini menganalisis perkembangan fenomena golput (golongan putih) dalam pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara konsisten maupun yang berubah-ubah memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan umum. Fokus utama dari studi ini adalah menganalisis dinamika sosial, politik, ekonomi, serta perubahan perilaku pemilih yang menyebabkan angka golput tetap signifikan di berbagai periode pemilu. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks dan dampak fenomena golput terhadap keberlangsungan demokrasi, serta merumuskan solusi untuk menekan angka golput pada pemilu mendatang.

Chelsea Jenny Pattiwael (2019) dengan judul "Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Ambon Provinsi Maluku". Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi politik perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Ambon. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun yang menghambat keterlibatan perempuan dalam proses politik, khususnya sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Selain itu, penelitian ini ingin melihat peran lingkungan sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif perempuan dalam sistem demokrasi di Provinsi Maluku.

Esra Julita, dkk., (2024) Penelitian ini berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran Sungai Deli serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024. Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta akses informasi memengaruhi kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat marginal

dalam berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, serta peran pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik di wilayah-wilayah terpencil dan kurang terjangkau tersebut.

Alfarisyi Dimas, dkk., (2023) mengenai "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi." Penelitian ini membahas bagaimana pendidikan demokrasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mekanisme pemilu sebagai fondasi utama dalam membangun partisipasi politik yang sehat. Melalui pendekatan edukatif, baik formal maupun non-formal, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi politik mampu memotivasi masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak pilihnya dan terlibat dalam proses politik secara lebih kritis dan bertanggung jawab.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Putnam (2000) yang menyatakan bahwa Modal Sosial memiliki tiga dimensi yakni *Trust* (Kepercayaan), *Norm of Reciprocity* (Norma timbal balik), *Social Network* (Jaringan Sosial). Adapun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran KPUD Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, PPPK Kecamatan Sunggal dalam meningkatkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024 dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024, serta upaya KPUD, Kecamatan Sunggal, dan PPPK Kecamatan Sunggal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang model penelitiannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan di lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teori utama yang digunakan adalah Teori Putnam (2000) yang mencakup tiga dimensi Kepercayaan, Norma Timbal Balik, dan Jaringan Sosial. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti keahlian mereka dalam bidang yang relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam mengamati objek sedang diteliti.. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi (Nasution, 2023). Simangunsong (2016:110) menyatakan bahwa "Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara penulis dan informan untuk memperoleh informasi". Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode ini Miles and Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono,

2019). Penelitian ini dilaksanakan di KPUD Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Sunggal. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses data dan lokasi penelitian, serta dapat menjamin kredibilitas data penelitian karena didapatkan secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024

1. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan penyelenggaraan pemilu merupakan fondasi utama untuk mendorong partisipasi politik. Ketika warga yakin bahwa pemilu berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan, mereka merasa suara dan kontribusinya dihargai sehingga terdorong untuk ikut serta aktif. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman-pengalaman positif, misalnya transparansi dalam penghitungan suara, komitmen lembaga pemilu terhadap keadilan, serta peran media yang menyajikan informasi akurat dan tidak berpihak.

2. Norma Timbal Balik

Norma timbal balik mencerminkan harapan bahwa setiap kontribusi warga seperti memberikan suara dalam pemilu akan mendapatkan respons atau manfaat nyata dari pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa partisipasi mereka direspon dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan janji politik, dan koordinasi yang baik antar lembaga, motivasi untuk terus terlibat dalam proses demokrasi akan meningkat. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan timbal balik yang memadai akan menurunkan kepercayaan dan memicu apatisme.

3. Jaringan Sosial

Jaringan sosial adalah struktur hubungan horizontal antarwarga yang bersifat sukarela, timbal balik, dan saling menguntungkan. Melalui asosiasi warga seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, atau forum lingkungan informasi tentang pemilu tersebar lebih cepat dan solidaritas sosial terbentuk. Jaringan yang kuat tidak hanya memperkuat norma timbal balik, tetapi juga memudahkan mobilisasi kolektif, sehingga masyarakat merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024

3.2.1 Faktor Penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada pemilu 2024

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang matang serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak agar dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menjalankan tugasnya dengan optimal. Beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal yaitu:

1. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat

Rendahnya kepercayaan masyarakat Kecamatan Sunggal terhadap pemerintah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan hasil kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak warga yang merasa bahwa janji-janji politik yang diberikan selama masa kampanye tidak terealisasi dengan baik. Hal ini bisa membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak dihargai, yang kemudian memicu rasa apatis dan penurunan tingkat partisipasi politik. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga turut berperan

dalam mereduksi kepercayaan publik. Ketika informasi yang diterima masyarakat terkesan lambat, tidak jelas, atau bahkan kurang transparan, masyarakat cenderung merasa terisolasi dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

2. Sosialisasi Yang Belum Optimal

Sosialisasi pemilu di Kecamatan Sunggal masih belum optimal. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, namun belum mencapai seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan yang sebenarnya menjadi prioritas dalam memberikan pemahaman ini, sosialisasi langsung kepada seluruh kelurahan dan desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi suatu daerah khususnya di Kecamatan Sunggal yang memiliki Tingkat golput yang tertinggi.

3. Rendahnya Keinginan Masyarakat Untuk Merubah Pola Pikirnya

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak dapat diabaikan, karena keterlibatan dan dukungan aktif dari masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pemerintahan suatu daerah, partisipasi yang kurang baik akan berdampak pada kualitas pemerintahan yang kurang baik juga.

4. Anggaran Yang Belum Memadai

Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh KPUD dalam melaksanakan sosialisasi pemilu secara menyeluruh di seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Sunggal menjadi salah satu tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan keterbatasan dana, KPUD kesulitan untuk mengakses seluruh lapisan masyarakat di daerah yang memiliki banyak wilayah, baik itu wilayah yang mudah dijangkau maupun yang lebih terpencil. Akibatnya, meskipun berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan, cakupannya masih terbatas, dan masih banyak warga yang kurang informasi atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang pentingnya pemilu dan bagaimana proses pemilu itu berlangsung.

5. Apatisme Masyarakat

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politik, karena keterlibatan dan dukungan aktif dari masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu pemerintahan dan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apatisme politik dapat mengarah pada ketidakpedulian terhadap proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat memperlemah akuntabilitas pemerintah dan merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri.

3.2.2 Faktor Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sunggal Pada Pemilu 2024

Meskipun terdapat berbagai faktor penghambat, ada sejumlah faktor pendukung yang dapat memperkuat upaya KPUD Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, dan PPPK Kecamatan Sunggal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024. Sebagai berikut:

1. Adanya Program Yang Mendukung

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Deli Serdang, program KPUD *Goes to School*. Program yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu serta sistem demokrasi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyoar

kalangan muda, terutama pelajar, agar mereka lebih paham tentang hak-hak politik mereka, seperti hak suara, serta pentingnya memilih pemimpin yang tepat.

2. Kolaborasi Pemerintah Yang Baik

Kolaborasi pemerintah yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks partisipasi politik, kolaborasi antara pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Baik

Masyarakat Kecamatan Sunggal menunjukkan sikap yang tertib dan tidak arogan dalam menyikapi berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan pemerintah maupun antar sesama. Mereka lebih mengutamakan dialog terbuka dan pendekatan yang konstruktif dalam menyampaikan pendapat atau keluhan, tentu hal ini merupakan suatu yang menjadi dukungan pemerintah dalam membangun dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya daripada mengekspresikan ketidakpuasan secara agresif atau emosional.

3.3 Upaya KPUD Deli Serdang dan pemerintah Kecamatan Sunggal dalam mengatasi faktor penghambat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024

1. Peran dalam meningkatkan rendahnya kepercayaan masyarakat

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik di Kecamatan Sunggal meliputi peningkatan transparansi kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan kualitas pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta kepedulian terhadap isu-isu sosial seperti ketimpangan dan diskriminasi melalui kebijakan yang adil. Selain itu, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik KKN melalui profesionalisme aparatur negara juga menjadi kunci utama. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif serta memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Deli Serdang secara menyeluruh.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga perlu diperkuat melalui forum-forum dialog publik, musyawarah desa, dan pelibatan tokoh masyarakat serta pemuda dalam proses kebijakan lokal. Dengan memberikan ruang partisipatif yang inklusif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan.

2. Peran dalam mengatasi sosialisasi yang belum optimal

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas sosialisasi pemilu yang belum optimal dapat dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, kolaborasi antara KPUD dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dengan dukungan dari aparatur desa hingga kecamatan, program sosialisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan logistik. Kedua, keterlibatan tokoh masyarakat, kepala desa, dan jejaring sosial lokal terbukti sangat efektif karena memiliki pengaruh besar dan kedekatan emosional dengan warga. Informasi yang disampaikan oleh mereka lebih mudah diterima, dipercaya, dan dapat mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu.

Ketiga, penggunaan media lokal seperti radio komunitas, baliho, dan spanduk menjadi sarana komunikasi yang tepat untuk menjangkau masyarakat desa yang mungkin belum terakses media digital. Media ini dapat menyampaikan pesan dengan pendekatan budaya lokal dan visual yang mudah dipahami masyarakat. Ketiga strategi ini, jika dijalankan secara sinergis, akan memperkuat efektivitas sosialisasi pemilu, mendorong peningkatan partisipasi politik di Kecamatan Sunggal, dan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang inklusif serta pemerintahan yang lebih responsif di Kabupaten Deli Serdang.

3. Peran dalam mengatasi keinginan masyarakat untuk merubah pola pikirnya

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya pemerintah dalam mengatasi rendahnya keinginan masyarakat untuk mengubah pola pikir politiknya dapat dilakukan melalui edukasi yang menekankan pada dampak langsung dari pemilu terhadap kehidupan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk menyadarkan warga bahwa hasil pemilu menentukan arah kebijakan publik, pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memahami pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi yang memengaruhi masa depan bangsa, masyarakat diharapkan merasa lebih memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan melalui hak pilih mereka.

Selain itu, keterlibatan tokoh adat lokal juga menjadi strategi yang efektif. Tokoh adat memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi dalam komunitasnya, sehingga mereka mampu menyampaikan pesan-pesan demokrasi dengan pendekatan yang lebih dekat dan relevan secara budaya. Melalui komunikasi yang dibangun oleh tokoh adat, masyarakat lebih mudah menerima pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat keterhubungan emosional masyarakat dengan proses politik, sehingga mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin yang mewakili aspirasi mereka.

4. Peran dalam mengatasi anggaran yang belum memadai

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam sosialisasi pemilu, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan kreatif seperti mengintegrasikan sosialisasi ke dalam kegiatan masyarakat yang sudah berjalan, seperti pasar rakyat, acara budaya, atau pertemuan RT/RW. Dengan menyampaikan informasi pemilu dalam konteks yang akrab dan tidak formal, pesan menjadi lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar. Sosialisasi semacam ini juga bersifat interaktif, memungkinkan dialog langsung antara penyelenggara dan warga, serta menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terakses media digital. Strategi ini membantu menyampaikan informasi secara lebih merata dan mendalam, sambil tetap hemat anggaran.

Selain itu, meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi langkah penting dalam menyebarkan informasi secara efektif. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini publik dan dipercaya oleh komunitasnya. Melalui ceramah, khutbah, atau kegiatan sosial keagamaan, mereka dapat menyampaikan pentingnya partisipasi dalam pemilu dengan pendekatan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih membumi. Kehadiran mereka juga membuka ruang diskusi bagi warga yang memiliki keraguan atau pertanyaan tentang proses pemilu. Dengan keterlibatan aktif para tokoh lokal, sosialisasi menjadi lebih persuasif dan mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya di Kecamatan Sunggal. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat demokrasi di Kabupaten Deli Serdang dan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif serta representatif.

5. Upaya dalam mengatasi apatisme masyarakat

Upaya pemerintah dalam mengatasi apatisme politik masyarakat di Kecamatan Sunggal harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan responsif. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum publik, musyawarah, atau konsultasi kebijakan, agar masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran nyata dalam menentukan arah pembangunan. Pelibatan langsung ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori modal sosial partisipatif Putnam (dalam Santoso, 2020:188), memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan publik dan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Selain itu, memberikan timbal balik yang nyata atas partisipasi masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur juga penting agar masyarakat melihat hasil konkret dari keterlibatan mereka.

Langkah strategis lainnya mencakup kepekaan terhadap isu sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi, dengan menghadirkan kebijakan yang inklusif dan adil. Realisasi janji-janji politik yang telah disampaikan saat kampanye juga berperan besar dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, pembentukan forum koordinasi antara pemerintah, SKPD, dan jaringan sosial masyarakat dapat memperkuat komunikasi dua arah dan sinergi dalam pembangunan. Seluruh langkah ini diharapkan mampu mengurangi rasa apatis masyarakat terhadap pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Deli Serdang secara menyeluruh.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan utama yang menjadi fokus diskusi dalam penelitian ini. Pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal pada Pemilu 2024 tergolong rendah dan mencatatkan angka Golput sebesar 28,76%, tertinggi di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi, disertai dengan minimnya norma timbal balik dari pemerintah kepada masyarakat serta lemahnya jaringan sosial atau komunikasi antara warga dan penyelenggara pemilu. Masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari keikutsertaan dalam pemilu, yang menyebabkan munculnya sikap apatis dan tidak percaya terhadap proses demokrasi.

Temuan kedua menunjukkan bahwa meskipun terdapat program sosialisasi dari KPUD dan keterlibatan tokoh masyarakat serta pemerintah lokal, pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial Putnam yang mencakup tiga indikator utama, yaitu kepercayaan (*trust*), norma timbal balik (*norms of reciprocity*), dan jaringan sosial (*network of civic engagement*), untuk menganalisis kondisi partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Sunggal, semua indikator tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan, sehingga memerlukan pendekatan partisipatif dan kebijakan yang lebih transparan serta responsif. Upaya perbaikan yang direkomendasikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan pelayanan publik, penyuluhan politik yang berkelanjutan, dan pembentukan forum komunikasi masyarakat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan serius. Berdasarkan teori modal sosial Putnam, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi hambatan utama, yang diperparah oleh lemahnya sosialisasi, praktik KKN, serta minimnya dampak nyata dari pemilu terhadap kesejahteraan masyarakat. Fenomena golput bukan hanya mencerminkan apatisme, tetapi juga menjadi bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Selain itu, kurangnya edukasi politik dan tidak meratanya sosialisasi, terutama kepada kelompok masyarakat terpencil atau kurang terdidik, memperkuat ketidakpercayaan ini. Pemerintah dinilai belum berhasil membangun norma timbal balik dan keterlibatan aktif yang seharusnya menjadi fondasi partisipasi demokratis. Meski demikian, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPUD Deli Serdang dan Pemerintah Kecamatan Sunggal untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Beberapa strategi tersebut meliputi peningkatan transparansi, pelayanan publik yang lebih baik, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama, penggunaan media lokal, serta pembentukan forum koordinasi untuk menjembatani komunikasi dua arah. Untuk mengatasi kendala anggaran dan apatisme, pendekatan langsung dan pelibatan kelompok marginal juga menjadi bagian dari solusi. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, agar mereka merasa dihargai bukan hanya saat pemilu, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Keterbatasan Penelitian; Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*futurework*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan mengungkapkan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sunggal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Ketua KPUD Kabupaten Deli Serdang, Camat Kecamatan Sunggal, dan Ketua PPPK beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Acu, N. (2009). *Golput dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 151–161.

<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/329>

Averus, A., & Alfina, D. (2020). *Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585–610.

<https://doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>

- Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 381–395.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406>
- Barnes, S. H., & Kaase, M. (1979). *Political Action*. London: Sage.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Julita, E., & Rekan. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika Ekseleusia*, 5(4).
<https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/7748>
- Khairunnisa, A., Yurizon, S. T., & Elsi, S. D. (2024). Analisis Mahasiswa Tidak Memilih Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 728–737.
https://www.researchgate.net/publication/381355212_Analisis_Mahasiswa_Tidak_Memilih_Pada_Pemilu_2024_Di_Kecamatan_Jambi_Luar_Kota_Kabupaten_Muaro_Jambi
- Labolo, M., & Achmad, W. (2022). Community Political Participation in Strengthening Local Democracy in Indonesia. *CEMJP*, 30(4), 2548–2553.
https://journals.kozminski.cem-j.org/index.php/pl_cemj/article/view/906
- Liu, H. K. (2024). *Exploring Relationships Between Nonprofit Participation and Political Participation in Asian Context*. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 35, 1–22.
<https://doi.org/10.1007/s11266-022-00538-8>
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation*. Chicago: Rand McNally.
- Miura, H., Lee, T., & Kim, E. (2025) *Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level: The Case of Residents' Self-Governance Associations in Seoul, South Korea*. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 36, 204–216.
<https://doi.org/10.1007/s11266-024-00708-w>
- Nasution, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, F. (2020). *Krisis Kepercayaan Politik di Indonesia*. Jakarta: BRIN Press.
- Nyqvist F., Serrat, R., Nygard, M., & Nasman, M. (2024). *Does Social Capital Enhance Political Participation in Older Adults? Multi-level Evidence from the European Quality of Life Survey*. European Journal of Ageing.
<https://doi.org/10.1007/s10433-024-00825-x>
- Putnam, R. D. dalam Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Pattiwael, C. J. (2019). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Ambon Provinsi Maluku. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)*.
<https://eprints.ipdn.ac.id/15811>

Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Taun, T., Kartika, N. A., Sari, N. N., Sihotang, O. M., Azhar, P. A., Oktavairuz, R., Amelia, S., & Fahma, V. N. (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput Dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 9–13.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1485>

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality*. Cambridge: Harvard University Press.

